

PENGARUH KORUPSI DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP IMPLEMENTASI PANCASILA

**Aris jujur setyoko, Erlinda Rahmawati, Masayu Bintang Khaerunnisa, Nuurinaa
Dewi Kholimah Ismawati, Aris Prio Agus Santoso**

¹Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi, Politeknik Insan Husada Surakarta
Jl. Letjen sutoyo Gg. Jodhipati No. 10, Genengan, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota
Surakarta, Jawa Tengah 57127, Indonesia
081262364471

Email :masayubintangkhaerunnisa@gmail.com

Abstract

Indonesia is a developing country that still has many problems. Of the many problems that exist in Indonesia, one of them that is still widespread is corruption cases. Corruption is a form of misappropriation of funds, including goods, services, authority, and many more. Corruption can occur anywhere, one of which is in the health sector. The aim of this research is to determine the influence of corruption in health services on the implementation of Pancasila, the 2nd principle. methods obtained from scientific works, theses, the internet, journals and other sources. From the results of the research, it was concluded that corruption can hinder social and economic development, weaken the character of the nation and produce many negative impacts.

Keyword : corruption, health sector, implementation of Pancasila

Abstrak

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memiliki banyak permasalahan. Dari banyaknya permasalahan yang ada di Indonesia salah satunya yang masih marak terjadi adalah kasus korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk penyelewengan dana, ada pula barang, jasa, kewenangan, dan masih banyak lagi. Korupsi bisa terjadi dimana saja, salah satunya di sektor kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh korupsi dalam pelayanan kesehatan terhadap implementasi pancasila, sila ke-2. metode yang diperoleh dari karya ilmiah, tesis, internet, jurnal, dan sumber lainnya. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, bahwa korupsi dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemah karakter bangsa dan menghasilkan banyak dampak negatif.

Kata kunci : korupsi, sektor kesehatan, implementasi Pancasila

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memiliki banyak permasalahan. Dari banyaknya permasalahan yang ada di Indonesia salah satunya yang masih marak terjadi adalah kasus korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk penyelewengan dana, ada pula barang, jasa, kewenangan, dan masih banyak lagi. Korupsi bisa terjadi dimana saja, salah satunya di sektor kesehatan.

Sektor kesehatan adalah sistem dinamis yang terdiri dari interaksi kompleks antara pasien, penyedia layanan, pembayar, pemasok, dan pembuat kebijakan. Kompleksitas inilah yang menjadikannya rentan terhadap korupsi. Korupsi, yang umumnya didefinisikan sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan

pribadi,” merupakan masalah dalam sistem layanan kesehatan secara global. Namun, penting untuk dicatat bahwa “korupsi” tidak hanya mencakup tindakan yang ilegal di sebagian besar negara, namun juga tindakan yang dapat dianggap tidak etis, dan jika meluas, akan melemahkan dan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan.

Korupsi terjadi dalam berbagai bentuk di sektor kesehatan dan terjadi di semua tingkat organisasi mulai dari lembaga pemerintah hingga penyediaan layanan kesehatan secara langsung. Demikian pula, motivasi yang mendasari korupsi di sektor kesehatan berbeda-beda di setiap negara. Oleh karena itu, mungkin sulit untuk mengadaptasi strategi pemberantasan korupsi yang berhasil dalam satu sistem kesehatan ke sistem lainnya dengan insentif, struktur akuntabilitas, mekanisme penegakan hukum, serta konteks sosio-ekonomi dan politik yang sangat berbeda.

Menurut temuan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sektor kesehatan selama satu dekade terakhir, alat kesehatan masih menjadi komoditas yang paling banyak dikorupsi. Tidak tersedianya standar, variasi spesifikasi yang sangat banyak, serta inovasi yang cepat menyebabkan alat kesehatan rentan untuk dikorupsi. Selain itu hasil temuan KPK juga menemukan sejumlah indikasi tata kelola alat kesehatan yang mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan uang negara. Salah satunya alat kesehatan yang tidak terpakai di sejumlah rumah sakit karena tidak sesuai dengan kebutuhan, pemeliharaan yang buruk, ataupun kurangnya tenaga sumber daya manusia yang mengoperasikan alat kesehatan.

Maraknya korupsi dalam berbagai sektornya dapat menghambat pembangunan. Menurut Fahmi Idris, sebagaimana dikutip oleh Agus Kasiyanto, maraknya korupsi sesungguhnya dapat merusak struktur pemerintah dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintah dan pembangunan pada umumnya. Selain itu korupsi juga berpengaruh terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Korupsi bukanlah suatu yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan keuangan negara oleh oknum-oknum penyelenggara negara/instansi/Badan Usaha Milik Negara/pemerintah, tetapi merupakan suatu korupsi yang sudah direncanakan dengan matang dari jauh-jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan anggaran.

Salah satu contoh perkara kasus korupsi dalam sektor kesehatan yang ada di Indonesia adalah kasus korupsi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atas nama Susi Astuti. S. KM, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan alat kesehatan puskesmas berfungsi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED). Perkara terdaftar dengan nomor 101/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaruh korupsi dalam pelayanan kesehatan terhadap implementasi sila pancasila ?

2. Metode Penelitian

1. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah mencari informasi yang relevan melalui karya ilmiah, tesis, internet, dan sumber-sumber lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses riset dimana menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari website, artikel, dan lain-lain.

3. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh korupsi dalam pelayanan kesehatan terhadap implementasi Pancasila.

4. Hasil Pembahasan

Korupsi merupakan tindakan tercela yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk negara dan masyarakat. Tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat berwenang, tetapi juga oleh berbagai kalangan profesi, termasuk tenaga kesehatan. Menurut UU Kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan tergolong sumber daya manusia, yaitu seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, penata anastesi dapat terlibat dalam tindakan korupsi, seperti menerima suap dari pasien atau keluarganya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap, bila berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Indonesia Corruption Watch (IWC) mendata kasus korupsi yang terjadi di sektor kesehatan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, yaitu sejak 2010-2018, ada sebanyak 220 kasus korupsi, dengan melibatkan 538 tersangka dan rata-rata perkasus menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3,7 Miliar atau total kerugian keuangan negara Rp. 822 Miliar. Potensi ladang korupsi di bidang kesehatan ini ada pada infrastruktur kesehatan dan upaya pencegahan penyakit dalam hal ini infrastruktur kesehatan, pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan jadi salah satu yang rawan di korupsi.

Pengaruh korupsi dalam pelayanan kesehatan dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Pasien yang memberikan suap kepada tenaga kesehatan dapat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pasien lainnya yang tidak memberikan suap. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan dan merugikan pasien yang tidak mampu memberikan suap. Selain itu, tindakan korupsi juga dapat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi dalam pengadaan alat kesehatan atau obat-obatan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang besar bagi negara. Selain itu, tindakan korupsi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah tindakan korupsi dalam pelayanan kesehatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan integritas profesi penata anastesi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan yang ketat terhadap pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Korupsi di bidang kesehatan timbul karena sudah tidak sesuai dengan kaidahnya. Adapun bentuk korupsi di bidang kesehatan dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Terjadi tindak pungli oleh PNS Dinas Kesehatan
2. Penyalahgunaan kekuasaan jabatan di RSUD
3. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum petugas kesehatan di Puskesmas
4. Klaim asuransi palsu
5. Penyalahgunaan fasilitas yang ada di RSUD dan Puskesmas

Tindakan korupsi yang dilakukan para oknum tenaga kesehatan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi merupakan suatu pelanggaran Pancasila sila ke-2 yang berbunyi “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya.

Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang kaku dan bersifat terbuka. Sehingga dalam implementasinya dalam dikembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan sama menjaga dan mengamalkan nilai pancasila. Mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai pancasila dapat dimulai dari lingkungan sekitar. Dalam menciptakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab , tenaga kesehatan dapat mengingatkan antar tenaga kesehatan yang lainnya bahwa perbuatan korupsi dapat merusak keadaban. Sejak dulu bangsa Indonesia dikenal ramah, jujur, bertanggung jawab, dan suka bergotong royong. Nilai itu harus terus ditumbuhkan kepada tenaga kesehatan bahwa kejujuran adalah modalitas menciptakan kepercayaan dalam berhubungan dengan pasien.

Menciptakan nilai keadilan sosial menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebab keadilan sosial adalah harapan dan cita-cita bersama seluruh masyarakat Indonesia.

5. Kesimpulan

Korupsi merupakan salah satu penyakit berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia baik masyarakat atas maupun bawah, masuk kedalam struktur pemerintahan baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Dengan adanya korupsi dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemah karakter bangsa dan menghasilkan banyak dampak negatif

lainnya. Dengan demikian untuk menghadapi korupsi masyarakat Indonesia harus memperkuat dan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Revi, and Nanda Ratri Fadilah. "Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 51-57.
- Annisa, Miftia Nur, Rika Maryani, and Aris Prio Agus Santoso. "Employment Legal System for TKI in Legal Protection." *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*. 2022.
- Aryono, and Rina Arum Prastyanti. "Criminal Liability in Withdrawing Fiduciary Collateral to Leasing Parties by Debt Collectors Based on Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6.2 (2023).
- Firdaus, Muhammad Ihsan. "The Legalization of Interfaith Marriage in Indonesia (Between Universalism and Cultural Relativism)." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 64-72.
- Hapsari, Ajeng Maulana, and Allia Amanda Febri Wahyuningtiyas. "Student Action in Defending the Country Upholding Pancasila Values." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 58-63.
- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 72-77.
- Kenjiro, Jordan, Arda Tri Angga, and Aris Prio Agus Santoso. "Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)." *Prosiding HUBISINTEK* 1 (2020): 113-113.
- Kusuma, Erska. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1.03 (2023): 97-101.
- Prasetya, Ajie, Aris Prio Agus Santoso, and Yulia Emma Sigalingging. "Sanctions Of Castrated For Children Viators Reviewing From Human Rights." *International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE)* 3.2 (2022): 61-73.
- Rezi, et al. *Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rohsawati, Mawardhany, et al. "Tajamnya Pedang Jabatan Bisa Memenggal Keadilan." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Santoso, Aris Prio Agus Santoso. "Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta: Trans Info Media. 2022.
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Kemunculan Agama Baru Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham Dan Kerukunan Umat Beragama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.1 (2021).
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.3 (2023).
- Sarwanto, Agus. "The Phenomenon of Juvenile Delinquency that Occurs in the Era of Globalization." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 45-50.

- Vinkasari, Elriza, et al. "Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan." *Prosiding Hubisintek 1* (2020): 67-67.
- Wurnasari, Annissha Azzahra, et al. "Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19." *Prosiding HUBISINTEK 1* (2020): 20-20.